



PPID BKAD
Prov. Sulawesi Selatan



LAPORAN

P E L A Y A N A N
I N F O R M A S I
P U B L I K

**BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan pelayanan informasi publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Pelayanan informasi publik yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Dalam konteks ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana badan ini telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses informasi publik kepada masyarakat, serta memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa depan.

Sebagai lembaga yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh publik. Dalam rangka itu, laporan ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pelayanan informasi publik, mulai dari prosedur permohonan informasi, hingga evaluasi terhadap efektivitas pelayanan yang diberikan. Adapun data dan informasi yang terkandung dalam laporan ini diperoleh melalui pemantauan, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait, yang semuanya bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya badan ini dalam memenuhi prinsip-prinsip pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi seluruh jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang. Penyusunan laporan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik dari internal Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Terima kasih

KEPALA BADAN

SALEHUDDIN, S.Kom., M.Si.

DAFTAR ISI

- 1 Kata Pengantar
- 2 Daftar Isi
- 3 Pendahuluan
- 4 Dasar Hukum
- 5 Tujuan Pelayanan Informasi Publik
- 6 Mekanisme Permohonan Informasi
- 7 Jenis Informasi Yang tersedia
- 8 Realisasi Pelayanan Informasi
- 9 Kendala dan Solusi
- 10 Evaluasi dan Rekomendasi
- 11 Penutup

DASAR HUKUM

1

UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

3

Perda No.6 Tahun 2016 tentang
Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4

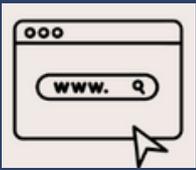
Peraturan Gubernur No. 115 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk :

- **01** Memastikan bahwa informasi yang bersifat publik tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan mudah
- **02** Meningkatkan transparansi kinerja dan pelayanan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
- **03** Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan aset daerah
- **04** Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang terbuka

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI



LAYANAN ONLINE

Melalui website resmi (<https://bkad.sulselprov.go.id>) dan media sosial resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Instagram, Youtube, Facebook, Twiter, dan TikTok



LAYANAN TATAP MUKA

Melalui Ruang PPID yang tersedia di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas.



LAYANAN SURAT MENYURAT (EMAIL)

Melalui alamat surat resmi dan email ppidbkad@gmail.com yang telah disediakan bagi masyarakat yang ingin meminta informasi

JENIS INFORMASI YANG TERSEDIA

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyediakan informasi publik yang meliputi :

Informasi Berkala

- *Laporan Keuangan Daerah*
- *Realisasi Anggaran*
- *Aset Daerah*
- *Informasi Program dan Kegiatan*

Informasi Serta Merta

Informasi yang terkait perubahan kebijakan atau peraturan yang mendesak seperti :

- *Perubahan kebijakan anggaran yang sifatnya mendadak*
- *Pengumuman lelang aset, dsb*

Informasi Yang Dikecualikan

Informasi yang menyangkut rahasia negara, rahasia pribadi, atau informasi yang dikecualikan sesuai undang-undang, seperti :

- *Data Pribadi Pegawai atau Pihak Terkait*
- *Informasi keuangan yang masih dalam proses Audit*
- *Informasi terkait keamanan aset atau fasilitas daerah, dsb*

REALISASI PELAYANAN INFORMASI

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

Untuk Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah menerima sebanyak 7 (Tujuh) Permohonan Informasi

JENIS PERMOHONAN

- Informasi Laporan Keuangan : 3 (Tiga) Permohonan
- Informasi Aset Daerah : -- Permohonan
- Informasi Kebijakan : 3 (Tiga) Permohonan
- Lain-lain : 1 (satu) Permohonan

STATUS PERMOHONAN

Disetujui 6 (Enam) Permohonan,
Ditolak 1 (satu) Permohonan dengan alasan dokumen yang diminta tidak jelas

KENDALA DAN SOLUSI



Kendala : Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur permohonan informasi serta kendala teknis dalam penyediaan informasi secara elektronik

Solusi : Badan Keuangan dan Aset Daerah mengadakan sosialisasi lebih intensif mengenai tata cara permohonan informasi serta meningkatkan kapasitas sistem informasi elektronik

Kendala Internal : Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola informasi publik.

Solusi : Mengadakan berbagai pelatihan, studi tiru ke kementerian/lembaga maupun daerah yang mempunyai pelayanan informasi publik yang informatif, serta penambahan personel pada unit pelayanan informasi publik

EVALUASI DAN REKOMENDASI

Evaluasi : Pelayanan informasi publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 berjalan dengan baik, namun perlu ada peningkatan dalam hal responsivitas dan aksesibilitas informasi.

Rekomendasi :

- Optimalisasi pelayanan online untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi
- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait guna menyebarluaskan informasi publik secara lebih efektif

PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada 2024 ini dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan mengalami berbagai peningkatan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memberikan pelayanan prima. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian BKAD yang mendapat predikat Cukup Informatif.

Tuntutan pelaksanaan good governance di era keterbukaan informasi yang dengan mudah dan cepat mendapat layanan informasi yang akurat memacu Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk selalu dapat menjalankan tupoksi dengan baik dan selalu berinovasi untuk mengembangkan layanan informasi. Pada 2024, PPID BKAD memutakhirkan tampilan dan konten di website bkad.sulselprov.go.id dan membangun Aplikasi Mobile PPID berbasis Android, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan informasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah di mana saja dan kapan saja.

Upaya dan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di tahun berikutnya dapat semakin berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas BKAD di mata masyarakat luas.